

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Padang Panjang sebuah kota kecil di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbentuknya wilayah otonomi kota Padang Panjang tertuang dalam Undang Undang No. 8 tahun 1956, pemerintahan daerah Kota Padang Panjang terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956, berulah satu tahun kemudian, status kota ini sejajar dengan kota dan kabupaten lainnya berdasarkan UU No.1 tahun 1957.¹

Penduduk Padang Panjang berasal dari dua arah dari arah utara dan arah timur. Koto baru, Pandaisikek, Aie Angek, Koto Laweh, Panyalaian, dan Singgalang wilayah utara yang berasal dari Luhak Agam. Sedangkan Gunung, Jaho, Tambangan, dan Paninjauan wilayah penyebaran timur yaitu berasal dari Luhak Tanah Datar.²

Pada tahun 1930 mata-pencaharian penduduk Padang Panjang sebagian terbesar bekerja di sektor pertanian. Diperkirakan sebagian besar di antaranya penduduk Minangkabau sebagai penduduk asli Padang Panjang. Pekerjaan lainnya

¹Witrianto, <http://repo.unand.ac.id/14832/1/Penduduk%20Kota%20Padangpanjang%20Awal%20Abad%20Ke-20.pdf>, dilihat pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.

² *Ibid.*

adalah sebagai pedagang. Diperkirakan para pedagang ini adalah orang Minangkabau, terutama yang berasal dari Padang Panjang.³

Padang Panjang terdiri atas banyak suku, yang didominasi oleh suku “*Minang*”. Minang itu sendiri merupakan sebutan bagi orang-orang yang berasal dari Sumatera Barat. Selain itu orang Minang juga dikenal khalayak ramai sebagai penganut sistem garis keturunan menurut ibu atau dikenal juga dengan bahasa ilmiah “*Matrilineal*”. Sebagaimana suku lainnya yang berada di Nusantara seperti Suku Nias, Batak, Mandailing, suku di Minang juga terdiri atas banyak marga atau klan

Pada awal pembentukan Minangkabau oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Parpatiah hanya ada empat suku induk, Suku Koto, Piliang, Bodi dan Caniago.⁴ Namun seiring berkembangnya waktu, suku-suku di Minang mengalami perkembangan, begitu pula di Padang Panjang. Tidak hanya di dominasi oleh empat suku induk, namun juga suku yang diluar jalur suku induk. Seperti, Suku Sikumbang, Jambak, Guci, Panyalai, dan Pisang. Dimana kelima suku ini yang berkembang dan mendominasi di Kota Padang Panjang.

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam yang masih memegang teguh ajaran dan syariat agama, di Nagari Gunuang adat istiadat telah berbaur dengan nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Padang Panjang

³ *Ibid.*

⁴ <http://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/15/suku-suku-diminangkabau/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 10.52 WIB.

disebut juga “Kota Serambi Mekah” yang mana dominasi penduduknya beragama Islam dan hanya sebagian kecil dihuni oleh agama lain (Kristen, Katolik, dan lain-lain). Jika dipersentasekan penduduk yang beragama islam sebanyak 98,58 % dan hanya 1,42 % yang menganut agama selain islam. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat terdata pada tahun 2014 tentang keagamaan yang ada di Kota Padang Panjang, menyatakan, jumlah penduduk yang beragama Islam berjumlah 57.859 jiwa. Untuk agama Protestan berjumlah 285 jiwa, lalu disusul agama Katolik dengan jumlah penganut 397, agama Hindu sebanyak 76 jiwa penganut dan ditutup agama Budha sebanyak 69 jiwa penganut.⁵

Pada tahun 1965 Padang Panjang sebagai Kota Praja diganti menjadi Kota Madya disusul dengan perubahan struktur pemerintahan dimana Resort diganti dengan Kecamatan, Jorong diganti menjadi Kelurahan pada tahun 1982.⁶ Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah Kota Padang Panjang No. 13 tahun 1982 dimana kota tersebut memiliki 16 kelurahan salah satu di antara kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sigando.

Kelurahan Sigando termasuk dalam wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang Batas wilayah Kelurahan Sigando terletak di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Paninjauan, sebelah selatan dengan Kelurahan Ekor Lubuk, sebelah timur dengan

⁵ Badan Pusat Statistik Padang Panjang, *Padang Panjang Dalam Angka tahun 2017*.(Padang Panjang: BPS, 2017), hal. 5.

⁶ <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pukul 13.30 tanggal 8 Juni 2022.

Nagari Batipuah Baruah, sebelah barat dengan Kelurahan Ganting. Sebelum menjadi kelurahan Sigando merupakan bagian dari Nagari Gunung yang terdiri dari ampek jurai yaitu Jurai Sigando, Jurai Ekor Lubuk, Jurai Ngalau, dan Jurai Ganting.⁷ Sejak ditetapkannya Padang Panjang sebagai kota pada tahun 1956 Nagari Gunung di pecah menjadi empat wilayah administratif yang terdiri dari empat jurai yang diatas yang kemudian berganti menjadi kelurahan, semenjak saat itu Nagari Gunung bukan lagi pemerintahan administratif.

Kelurahan Sigando berada di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Luas kelurahan 1,4 kilometer persegi, luas tersebut 10,57 % dari luas wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur dan 6,09 % dari luas wilayah Kota Padang Panjang. Jarak dari kantor kelurahan dengan kantor kecamatan adalah 3,4 kilometer, ke Balai Kota sekitar 5,9 kilometer dan ke Ibu Kota Provinsi 77,9 kilometer. Kelurahan Sigando berpenduduk 1525 jiwa terdiri dari 774 laki-laki dan 751 perempuan. Sedangkan Lurah yang sekarang sedang menjabat yaitu Risman, seorang anak Nagari Gunung yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Walikota Padang Panjang untuk memimpin Kelurahan Sigando. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Sigando yaitu terdapat Masjid Asasi yang tertua di Kota Padang Panjang yang kaya akan nilai sejarah, masjid ini menjadi pusat penyebaran islam di Kota

⁷ Yurnalisman Syam, *Profil Kerapatan Adat Nagari Gunuang*, Padang Panjang : KAN, 2018, hal. 1.

Padang Panjang, serta terdapat juga destinasi kampung wisata realigi dan budaya Kelurahan Sigando.

Berdirinya Kota Padang Panjang berdampak pada keberadaan wilayah nagari yang telah ada. Dulunya Nagari Gunung tergabung dalam wilayah adat Batipuh X Koto namun dengan dipecahnya Nagari Gunung menjadi empat kelurahan setelah bergabung dengan Kota Padang Panjang, keberadaan adat nagari semakin melemah. Keberadaan lembaga-lembaga adat semakin kurang relevan dengan tidak adanya wilayah administratif Nagari Gunung.

Setelah menjadi wilayah administratifnya sendiri Kelurahan Sigando menjalankan pemerintahan terlepas dari Nagari Gunung. Dinamika pemerintahan dan masyarakat Sigando dan hubungannya dengan Nagari Gunung terus menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Melihat dampak perubahan pemerintahan terhadap sosial budaya masyarakat. Untuk itu, penulis memberi judul penelitian ini **“Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 1982-2021”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tentang Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Seperti halnya penulisan

sejarah perlu diberikan batasan-batasan tertentu yang dikenal dalam penelitian atau penulisan sejarah, seperti:

- a. Batasan spasialnya yaitu wilayah Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang merupakan objek dari penelitian..
- b. Untuk batasan temporal dimulai tahun 1982 hingga tahun 2021. Pengambilan batasan awal tahun 1982 alasannya bahwa berubahnya penamaan resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan. Kemudian batasan akhir diambil yaitu tahun 2021, untuk melihat sejauh mana kemajuan di Kelurahan Sigando setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pemerintahan dan struktur kepemimpinannya, di mana pada tahun 1982 Kelurahan Sigando masuk dalam Resort Gunung yang terdiri dari empat kelurahan yakni Kelurahan Sigando, Gantiang, Ekor Lubuk dan Ngalau..

Untuk mempermudah penelitian tentang Dinamika Kelurahan Sigando, maka dalam pokok penelitian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando?
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi dari berdirinya daerah otonomi Padangpanjang terhadap masyarakat Kelurahan Sigando?
3. Bagaimana Pemerintahan Kelurahan Sigando dari tahun 1982 sampai tahun 2021?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando, dan juga melihat bagaimana bentuk perubahan dari pemerintahannya, sebagaimana tergambar dalam poin-poin berikut:

1. Untuk mengetahui Dinamika Pemerintahan di Kelurahan Sigando.
2. Menjelaskan dampak sosial ekonomi dari berdirinya daerah otonomi Padang Panjang terhadap masyarakat di Kelurahan Sigando.
3. Menjelaskan perkembangan Pemerintahan Kelurahan Sigando dari Tahun 1982 Sampai Tahun 2021?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian tentang sejarah masyarakat pedesaan dan sejarah pemerintahan pada khususnya. Selain itu, dengan adanya tulisan mengenai dinamika pemerintahan kelurahan ini dapat dijadikan acuan untuk penulisan dan penelitian lain dengan tema yang sama, sehingga diharapkan dapat membuat karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca mengenai Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando. Berikutnya, agar penelitian ini memberi manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Sigando dan memberikan informasi bagaimana perkembangan Kelurahan Sigando dari masa ke masa.

D. Tinjauan Pustaka

Studi tentang sejarah pedesaan bukan pertama kalinya ditulis. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penulisan ini. Buku “*Sosiologi Pemerintahan*” yang di tulis oleh I Nyoman Sumaryadi, menjelaskan tentang konsep

ilmu pemerintahan yang menitik beratkan pada fungsi utama pemerintahan, yaitu pelayanan-*public service and civil service*. Terbentuknya lembaga pemerintahan tidak terlepas dari sejarah sebuah Negara. Pemerintah menggerakkan prinsip-prinsip sebuah Negara, yang mengatur dan mempertahankan, dan yang menjadi elemen vital dalam sebuah Negara adalah pemerintah.⁸

Dalam buku karangan Gusti Asnan dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*.⁹ Membahas mengenai keberadaan awal VOC di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan nagari yang diakui oleh pimpinan VOC dan menjadikan alasan pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat. Corak pemerintahan nagari juga dibahas pada saat perang kemerdekaan dan sistem pemerintahan nagari di masa Orde Baru.

Pembahasan tentang perkembangan sistem pemerintahan di Sumatera Barat juga ada di kaji oleh Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*.¹⁰ Digambarkan dalam buku ini mengenai sejarah politik di Sumatera Barat hingga periode akhir penjajahan sampai Era Reformasi.

⁸ I Nyoman Sumaryadi, "Sosiologi Pemerintahan" Bogor: Ghalia Indonesia., 2010.

⁹ Gusti Asnan."Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi", (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

¹⁰ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Buku Obor, 2005.

Yunita Fadhila dalam skripsinya yang berjudul “*Pemerintahan Desa Di Kubang Putih Kab. Agam (1984-2001)*”, skripsi ini mengkaji mengenai kehidupan masyarakat di masa pemerintahan desa, di mana setelah diberlakukannya lima tahun pemerinthaan desa, wilayah Kubang Putih terbagi menjadi dua desa Kubang Putih Ateh dan Kubang Putih Bawah. Dalam periode 15 tahun, hanya terdapat satu orang saja yang menjadi kepala desa di masing-masing wilayah.¹¹

Ermin Said Lubis dengan judul skripsi “*Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman : Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari*”.¹² Dalam skripsi ini mengkaji mengenai perubahan di Nagari Tarung-tarung pada saat berubah menjadi pemerintahan desa, dan juga proses kembalinya yang awal pemerintahan desa hingga berubah menjadi pemerintahan nagari.

Artikel membahas mengenai nagari ditulis oleh Muchtar Naim,” *Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural*”.¹³ Pembahasan dalam artikel ini mengenai masalah nagari dan desa, serta terdapat juga didalamnya peran pemerintah dalam pengelolaan pembangunan dan peran pemerintah Kelurahan Sigando.

¹¹ Yunita Fadhila.”*Pemerintahan Desa Di Kubang Putih Kab.Agam Tahun 1984-2001*”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.(Padang 2018).

¹² Ermin Said Lubis.”*Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari tahun1983-2006*”.Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.(padang 2018).

¹³ Muchtar Naim, *Makalah Nagari Versus Desa:Sebuah Kerancuan Struktural*,dalam Moh Hasbi Nagari, *Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya,1990).

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando. Dalam kajian ini akan dikaji mengenai pola pemerintahan di Kelurahan Sigando dan juga bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat dengan adanya perubahan dari pemerintahan resort ke pemerintahan kecamatan.

Pemerintahan memiliki dua arti, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas disebut *regaring* yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga lembaga dan petugas yang diberikan wewenang untuk mencapai tujuan dalam negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁴

Dalam penelitian ini membahas persoalan pemerintahan, tujuannya adalah melihat suatu badan dalam menentukan kebijakan, agar dapat diperkirakan arah perkembangan di masa yang akan datang mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang diharapkan. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah pemerintahan. Posisi yang paling rendah adalah kelurahan yang merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan kota. Kelurahan dikepalai oleh seorang kepala lurah yang dipilih melalui walikota dan menjadi pegawai negeri sipil.

¹⁴ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ilmu sejarah. Menurut *Kenneth D. Bailey*, metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.¹⁵ Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan *menganalisis* secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.¹⁶

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka, yaitu sumber-sumber yang menerangkan tentang keberadaan letak geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi sosial politik dimasa lalu. Melakukan studi ke daerah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan sehingga lebih mendapatkan secara administrasi wilayah berdasarkan sejarah. Sumber dalam metode sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip yang dapat diperoleh dari Kantor Lurah, arsip pribadi, BPS, koran-koran yang bersangkutan langsung dengan Kelurahan Sigando, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang memperkuat atau mendukung sumber primer yaitu seperti buku-

¹⁵ Kenneth D Mengutip dari Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Univrsitas Gajah Mada, 1994), hal.4.

¹⁶ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusant.*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1975), hal. 35.

buku, makalah, dan skripsi.¹⁷ Melakukan wawancara dengan informan utama yang ada di Kelurahan Sigando, seperti Lurah Sigando Risman, tokoh masyarakat Kelurahan Sigando, Angku Datuak Lelo Anso dan Angku Datuak Banso Rajo, Tetua Nagari Angku Datuak Tan Majo Lelo, Angku Datuak Rajo Ameh, dan Anduang Nuzir, serta tokoh-tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat dengan topik permasalahan.

Tahapan kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber¹⁸. Kritik ekstern juga merupakan kritik diluar isi seperti ejaan yang digunakan, warna kertas, matrik dan sebagainya. Kritik sumber dilakukan sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses serta mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi.

Tahap ketiga adalah interpretasi (*sintesis*) berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan atau merangkai satu fakta ke fakta lainnya sehingga terjalin suatu kesatuan pengertian yang utuh. Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1995, hal.99.

ini fakta-fakta ditemukan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat mengerti Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando.

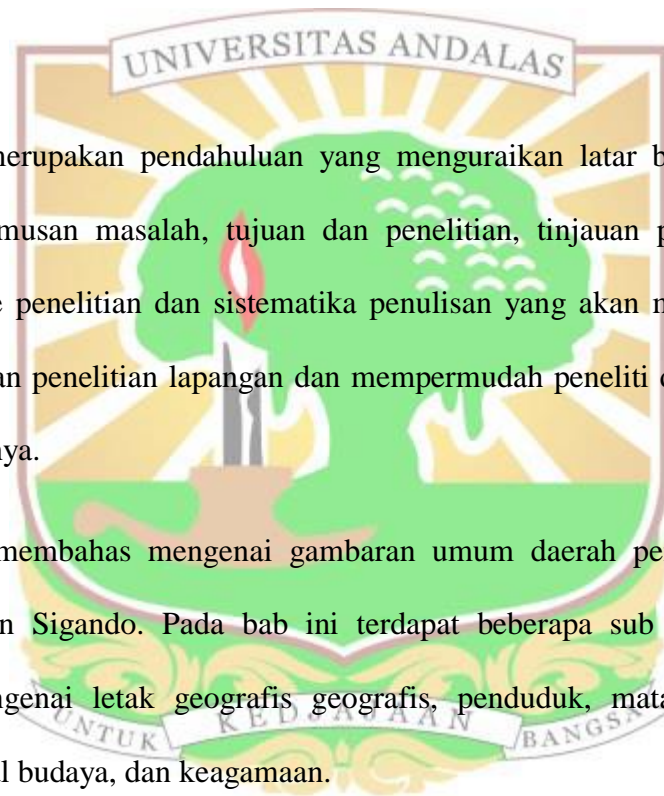
G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan di rumuskan secara beraturan dan kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya.

Bab II membahas mengenai gambaran umum daerah penelitian, yaitu profil Kelurahan Sigando. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, pertama membahas mengenai letak geografis geografis, penduduk, mata pencaharian penduduk, social budaya, dan keagamaan.

Bab III membahas mengenai Jurai Sigando sebelum menjadi Kelurahan Sigando, Pemerintahan Kota Padang Panjang, Struktur Pemerintahan Kelurahan Sigando, dan Destinasi Wisata Realigi dan Budaya Kelurahan Sigando.



Bab IV merupakan bab kesimpulan atau penutup dan merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang telah di lakukan peneliti.

